

POLEMIK CALON INDEPENDEN PADA PEMILUKADA ACEH 2012 DALAM FRAMING MEDIA LOKAL

Firdaus Mirza Nusuary dan Fadhillah Sri Meutia

E-mail: fmirza1016@gmail.com & dhilameutia@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada politik media lokal dalam Pemilu Aceh 2012 melalui analisis framing untuk melihat bagaimana kecenderungan arah politik media Serambi Indonesia dan Modus Aceh dalam mengkonstruksi dan membingkai polemik calon (I)ndependen yang memberi pengaruh pada pemilu Aceh 2012. Patut diketahui bahwa pada sebuah media massa, faktor ekonomi menjadi sebuah kekuatan eksternal yang berpengaruh atas penampilan isi media, yakni pemodal, khalayak dan pengiklan. Sedangkan faktor internal, dipengaruhi pada sosok jurnalis yang mempunyai sikap, nilai, kepercayaan dan orientasi tertentu dalam ideologi, politik, agama, dan etnisitas, yang **mempengaruhi**/(memengaruhi) (di) dalam mengkonstruksikan realitas. Melihat kondisi geopolitik di Aceh, media massa lokal tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan yang luas dalam mengkonstruksi realitas yang dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, politis dan ekonomis. Berkaitan dengan polemik calon (I)ndependen, peneliti menemukan perbedaan pemberitaan diantara dua media massa yang dalam setiap pemberitaannya melakukan konstruksi secara berbeda dan memberikan citra positif. Pemberitaan yang berkenaan dengan penolakan calon (I)ndependen dalam pengkonstruksian pemberitaan sedikit banyak memberi dampak terhadap memanasnya perpolitikan di Aceh, sampai ke tingkat nasional sehingga memberi kebijakan untuk mengundurkan Pemilu Aceh.

Kata kunci: Aceh, Hegemoni Media dan Framing Realitas, Pemilu Aceh 2012.

***Abstract** This research focuses on the politics of the local media in Aceh Election 2012 through framing analysis to see how the trend towards political media (of) Serambi Indonesia and (Aceh's) Modus Aceh of constructing and framing polemic (I)ndependent candidates who make an impact on Aceh election 2012. It is worth noting that on a mass media, economic factors into an external force that affect the appearance of media content, i.e. investors, audiences and advertisers. While internal factors, influenced by the figure of journalists who have attitudes, values, beliefs and a particular orientation in ideology, politics, religion, and ethnicity, that influence in constructing reality. (To consider) see geopolitical conditions in Aceh, the local media (does not) did not fully have greater freedom in constructing reality influenced by (ideological, political and economical interest) ideological interests, politically and economically. Polemics related to (I)ndependent candidates, researchers found (out that there is) difference between the two media reports (construct differently and provide a positive image in every single of their reports) that in any preaching, doing construction differently and provide a positive image. (Regarding to the news of rejection of Independent candidates brings about a bit impact on politics in Aceh even in national region, so as to give a policy to postpone the election) News regarding the rejection of independent candidates in the news The constructed more or less warming impact on politics in Aceh, up to the national level so as to give a policy to postpone the election.*

Keywords: Aceh, Hegemony Media and Reality Framing, Pemiluakada Aceh 2012.

A. PENDAHULUAN

Media merupakan salah satu bagian dari pilar demokrasi, yang memiliki peran sebagai penghubung antar kelompok sosial yang memfasilitasi kegiatan interaksi antar individu, masyarakat, lembaga, institusi dan lainnya serta memberikan informasi lintas waktu dan tempat. Seiring berkembangnya demokrasi, media telah menjadi pembentuk opini publik¹. Terkadang media tidak ragu dalam menyatakan opini dan keberpihakan serta membangun wacana dalam masyarakat. Media juga berperan besar dalam membangun koridor demokrasi dalam masyarakat, sehingga menciptakan sinergisitas antara masyarakat dan kelompok elite dalam memberi informasi keputusan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan serta memperoleh masukan dari publik demi tercapainya sebuah dialog.

Perlu diketahui bahwa setiap media massa memiliki kebijakan redaksional tersendiri dalam mewacanakan pemberitaan suatu peristiwa menurut sudut pandangnya masing-masing. Media massa juga memiliki agenda setting dalam pemberitaan peristiwa, apakah layak untuk diberitakan atau tidak. Suatu berita politik yang menjadi agenda media belum tentu menjadi agenda publik. Agenda setting media berarti membentuk persepsi akan suatu khalayak tentang apa yang dianggap penting, dengan teknik pemilihan dan penonjolan suatu isu. Dan media memberikan studi kasus tentang sesuatu itu apa yang paling penting pada saat itu (Elvinaro Ardianto dan Luki Komala Erdinaya dalam Dedi Kurnia Syah Putra, 2012).

Kajian tentang analisa media di Aceh saat ini sangat diperlukan untuk memetakan segala bentuk dominasi yang melingkupi pemberitaan yang ada di masyarakat Aceh itu sendiri. Dominasi-dominasi yang bercokol di Aceh tentunya sangat bervariasi karena gesekan antara kepentingan Pemerintah pusat dan Daerah yang masih sangat tinggi untuk menjaga ekuilibrium demokrasi yang sudah terjaga. Melalui analisa media, diharapkan segala bentuk wacana dominasi baik lokal maupun pusat akan dibaca dengan baik tanpa ada bias analisa yang akan terjadi.

Menariknya studi ini adalah terletak pada adanya dua komponen media massa yang mengkonstruksi realitas polemik calon independen pada kancah perpolitikan lokal yakni pemiluakada Aceh 2012. Fenomena calon independen dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Di samping itu, setelah mencermati perkembangan pengaturan pemiluakada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah.

Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan dalam konsideran "menimbang" huruf d yang berbunyi, "bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan

¹ "Kajian Elizabeth Noelle-Neuman yang menitik beratkan peran opini dalam interaksi sosial. Media memiliki kekuatan besar terhadap realitas sosial, dimana opini publik sebagai isu kontroversial yang berkembang pusat melalui media." dalam Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2012.

kehidupan demokrasi”, sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 UU Pemda adalah syarat bagi perseorangan.

Singkatnya, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), membuka kesempatan bagi perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui parpol, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan bukan pula merupakan suatu tindakan dalam keadaan darurat (*staatsnoodrecht*) bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Alasannya, pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis.

B. KERANGKA TEORI

1.1 Analisa Framing Model Robert N. Entman

Analisa framing merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif media ketika menyeleksi isu dan melakukan pemberitaan. Berdasarkan suatu perspektif tersebut, media dapat menentukan suatu fakta yang akan diambil, diberitakan atau dihilangkan, serta kemana berita akan diarahkan. Dengan demikian, suatu berita menjadi manipulatif dan bertujuan memanipulasi dan mendominasi keberadaan suatu subjek sebagai yang legitimate, *objektif*, alamiah, wajar, dan tak terelakkan².

Framing dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Robert N. Entman adalah salah seorang [ahli](#) yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk *Journal of Political Communication*. Robert N. Entman, "*Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*", (*Journal of Communication*, Vol 43, No. 4, 1993). Konsep framing, Entman sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. *Framing* memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan oleh pembuat teks.

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis yang mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Dalam konsep

²Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisa Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2009. Hal 162

Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.

Pada level sosiologi, frame dilihat untuk menjelaskan bagaimana organisasi dari ruang berita dan pembuat berita membentuk berita secara bersama-sama, yang menempatkan media sebagai organisasi yang kompleks yang menyertakan di dalamnya praktik profesional. Melihat berita dan media tersebut, telah menempatkan berita sebagai institusi sosial. Berita ditempatkan, dicari, dan disebarkan lewat praktik profesional dalam organisasi. Karenanya, hasil dari suatu proses berita adalah produk dari proses institusional.

1.2 Hegemoni Gramsci

Hegemoni sering kali digunakan untuk menggambarkan cara kelas-kelas kapitalis menginfiltrasi pikiran rakyat dan menerapkan dominasinya. Yang luput dari definisi ini adalah Gramsci tidak hanya menggunakan istilah "hegemoni" untuk menggambarkan aktivitas kelas penguasa, ia juga menggunakannya untuk mendeskripsikan pengaruh yang diberikan oleh kekuatan-kekuatan progresif. Dengan mencamkan hal ini, kita dapat melihat bahwa hegemoni seharusnya didefinisikan sebagai hal yang dilakukan bukan saja oleh kelas penguasa, faktanya ia adalah proses di mana kelompok-kelompok sosial (apakah mereka progresif, regresif, reformis, dan lain sebagainya) meraih kekuasaan untuk memimpin, bagaimana mereka memperluas kekuasaan mereka dan mempertahankannya.

Martin Clark³ mendefinisikan hegemoni sebagai "cara kelas penguasa mengontrol media dan pendidikan". Meskipun definisi ini mungkin lebih sempit dari biasanya, ia mencerminkan kesalahan-pembacaan yang biasa terjadi terhadap konsep tersebut, yakni bahwa hegemoni adalah cara kelas penguasa mengontrol institusi-institusi yang mengontrol atau mempengaruhi pemikiran kita. Walau demikian, kebanyakan literatur hegemoni di kalangan akademik dan aktivis mengambil sudut pandang yang sedikit lebih lebar dari ini, dengan menyertakan lebih banyak institusi dalam pelaksanaan hegemoni - setidaknya menyertakan juga militer dan sistem politik. Problemmnya adalah bahkan ketika institusi-institusi ini diperhitungkan, fokusnya cenderung eksklusif kepada kelas penguasa, dan metode-metode kontrolnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam *The Prison Notebooks* Gramsci mengacu pada hegemoni untuk menggambarkan aktivitas kelompok yang sedang dominan maupun kekuatan-kekuatan progresif. Bagi Gramsci, apa pun kelompok sosialnya, kita dapat melihat bahwa terdapat tahapan perkembangan bersama tertentu yang harus mereka lalui sebelum mereka dapat menjadi hegemonik. Mengambil dari Marx, persyaratan pertama adalah ekonomi: bahwa kekuatan material telah cukup dikembangkan sehingga orang-orang di dalamnya mampu memecahkan problem-problem sosial yang paling mendesak. Gramsci kemudian berlanjut menyatakan bahwa terdapat tiga tingkat perkembangan politik yang harus dilalui suatu kelompok sosial agar dapat mengembangkan gerakan yang dapat memulai perubahan.

1.3 Konstruksi Sosial dalam Media

³Clark, M. (1977). Antonio Gramsci and the Revolution that Failed. New Haven: Yale University Press.

Membahas konstruksi sosial (*social construction*), tidak lepas dari apa yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann, dalam buku mereka berjudul “*the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”⁴. Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya, “*reality is socially constructed*”.

Konstruksi sosial berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Namun demikian, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

1.4 Ekonomi Politik Media

Tarik-menarik kepentingan antara media lokal dengan elit politik dalam polemik pemilukada Aceh 2012 dimungkinkan terjadi karena beberapa penyebab yang berpangkal pada profesionalisme media. Profesionalisme media dapat dilihat dari produk akhir media berupa isi atau teks, yang secara sederhana terlihat dari berita yang disajikan tentang polemik pemilukada yang ditampilkan kurang berimbang. Selanjutnya merujuk pada dinamika sosial budaya, ekonomi politik, konteks sejarah, dan regulasi media.

Dalam kepemilikan media massa, Peter Golding dan Graham Murdock (2000) dalam Henry Subiakto dan Rachmah Ida, berpendapat bahwa media massa adalah produsen budaya yang lebih berperan sebagai mesin bisnis pencari keuntungan. Dimana ideologi kapitalisme telah meresap dalam institusi media, serta mewarnai hubungan antara pemilik dan para pekerjanya. Walau teks dan isi dari berita oleh media tersebut tidak menampakkan dukungannya terhadap kapitalisme, tapi pada dasarnya isinya lebih mengarah untuk melayani kepentingan pasar. Perusahaan media sebagai institusi kapitalis, bisnisnya telah menjangkau kemana-mana, namun kontrol kepemilikan terpusat pada beberapa orang saja⁵.

Ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh pemodal, para elite penguasa dan pengusaha berkolaborasi dalam mengatur isi media. Sehingga kebebasan dari pers ataupun jurnalis, telah disusupi oleh propaganda-proganda dari kepentingan segelintir orang. Setiap berita telah dikonstruksi oleh pemodal dengan kekuatan politik dan bisnis.

Chomsky (2000) menilai bahwa adanya konspirasi dari para elite dalam mengontrol mengkonstruksi realitas kedalam berita dan informasi. Ia melihat media telah menjadi alat kepentingan politik, ekonomi, militer, dan kultur kalangan penguasa. Menurutnya, para *gate keeper* media telah menjadi pion politisi dan pemodal untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, atas nama politik atau bangsa, para penguasa mengatur setiap pemberitaan sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka.

C. Hasil Temuan

⁴Lihat, Peter L Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (New York: 1966).

⁵ Rachmah Ida dan Henry Subiakto. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana 2012, hal 136

1.1 Pemberitaan Media: Polemik Demokrasi Pemilukada Aceh 2012

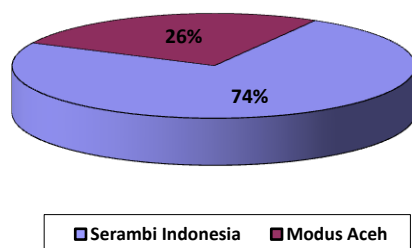
Salah satu penyebab belum disahkannya *rajan Qanun* pemilukada adalah wacana boleh tidaknya calon independen maju dalam pemilukada. Dimana, wacana tersebut menjadi perdebatan hangat di antara para anggota DPRD, dan sebagian besar anggota partai lokal menentang adanya calon independen karena menganggap bahwa keberadaan calon independen telah terwadahi dengan adanya partai lokal. sebaliknya, partai-partai nasional menganggap bahwa keberadaan calon independen merupakan jawaban dari tidak terwadahnya aspirasi rakyat Aceh selama ini oleh partai lokal yang terkesan sibuk mengurus kemajuan partainya sendiri yang rata-rata masih seumur jagung, dan lebih menyuarakan kepentingan partainya. Secara hukum, keberadaan calon independen telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VII/2010.

Kemunculan wacana calon independen dalam Pemilukada Aceh merupakan jawaban dari kekecewaan sebagian masyarakat Aceh atas kinerja partai-partai lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendengar aspirasi mereka pasca konflik. Dan keberadaan Partai Aceh sebagai manifesto Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan salah satu implementasi MoU Helsinki, sangat diharapkan oleh rakyat Aceh pada awal pembentukannya sebagai wadah aspirasi rakyat Aceh yang selama ini tidak tersampaikan. Perjuangan GAM pada masa konflik yang berakhir dengan penandatanganan MoU Helsinki dilandasi dengan semangat perdamaian pasca bencana tsunami. Namun demikian, masa-masa peralihan dari GAM ke Partai Aceh, selanjutnya dari hukum rimba ke hukum sosial masyarakat dan dari sistem militeristik ke demokrasi tampaknya masih membutuhkan waktu yang panjang.

1.2 Posisi dan Kecendrungan Media Lokal Terhadap Realitas Polemik Calon Independen dalam Framing Media Lokal

Melalui media, berbagai peristiwa yang dilaporkan bisa membentuk dan menyuarakan opini publik. Dalam sebuah masyarakat yang demokratis, pers tidak dapat memanipulasi atau mengabaikan isu semau mereka sendiri. Hal ini dikarenakan persaingan di antara sesama media. Selain itu masyarakat juga mempunyai kebebasan untuk menetapkan agenda yang berbeda.

Menilai posisi media lokal di Aceh dalam mendorong berkembangnya demokrasi di Aceh, pemberitaan terkait pro dan kontra ada tidaknya menghadirkan kembali calon independen kembali di Aceh. Dari hasil penginputan terhadap pemberitaan di media lokal di Aceh yaitu Serambi Indonesia dan Modus Aceh, dari bulan Januari – Desember 2011 mendapatkan hasil sebagai berikut:



Dari gambar grafik pie menunjukkan Serambi Indonesia lebih mendominasi dalam memberitakan issue calon independen dengan persentase 74%, daripada Modus Aceh 26%.

Dalam upaya membingkai berita tentang pemilukada di Aceh, media lokal (Serambi Indonesia dan Modus Aceh) ternyata sangat berperan penting untuk mengarahkan persepsi masyarakat di Aceh tentang pemilukada tersebut. Pada kasus pengangkatan berita tentang calon independen, ternyata masing-masing media punya kepentingan dalam setiap pemberitaannya. Setiap pemberitaan tentang polemik pemilukada, Serambi Indonesia melakukan konstruksi (pencitraan) terhadap Partai Aceh dan calon independen secara berbeda. Secara umum terhadap Partai Aceh dan calon independen memberikan citra positif, dan untuk perdebatan tarik ulurnya adanya calon independen cenderung mendapat porsi lebih.

Hal yang menyebabkan perbedaan pengkonstruksian tersebut tidak terlepas dari kondisi Aceh saat itu dan juga keberadaan Serambi Indonesia itu sendiri. Untuk media massa lokal di Aceh, Serambi Indonesia merupakan media massa tertua. Melihat kondisi Aceh saat itu masih dalam transisi demokrasi setelah konflik, dan tsunami yang kemudian perjanjian damai Helsinki. Situasi geopolitik Aceh dalam tensi naik turun, terlihat pada proses demokrasi menuju pemilukada 2012 dengan memanasnya politik di Aceh. Penolakan akan adanya calon Independen oleh partai lokal yang menang pemilu sebelumnya (Partai Aceh) dan berbagai elit politik lainnya menimbulkan pro kontra antara yang menolak dan menerima calon independen.

Sedangkan Serambi Indonesia, memposisikan diri selayaknya media massa independen yang tidak memihak. Penulis menilai, bahwa dalam memberitakan pemilukada yang menuai polemik terkait keberadaan calon independen, ada dua hal yang memperlihatkan bagaimana Serambi Indonesia dalam melihat realitas. Pertama akan keberadaan Partai Aceh, yang anggotanya dari eks-combatan dan telah mendominasi di seluruh Aceh dan juga satu-satunya partai lokal yang memenangkan pemilukada 2009. Bahkan hampir menguasai seluruh parlemen ditingkat kabupaten/kota. Kedua, Serambi Indonesia meningkatkan minat khalayak dalam setiap pemberitaan akan perdebatan tarik ulur calon independen demi kepentingan pasar.

Pada serangkaian uraian pemberitaan Serambi Indonesia terkait calon independen dengan jelas menonjolkan realitas keputusan MK menyetujui diperbolehkannya calon independen pada pemilukada Aceh 2012. Hal ini dengan jelas memperlihatkan secara tak langsung keberpihakan Serambi Indonesia dalam pemberitaannya kepada nasional (pemerintah pusat). Walau dalam pemberitaan terhadap PA yang menolak calon independen dengan citra positif, dan itu tampaknya situasional saja dikarenakan akan kekuatan Partai Aceh hampir mendominasi di seluruh Aceh. Dilihat dari *frameanalysis* maupun interpretasi, tidak terlihat tanda-tanda dari Serambi Indonesia terlibat dalam politik praktis. Dengan kata lain bahwa Serambi Indonesia lebih cenderung terhadap eksistensi diri sebagai media massa lokal, dan tidak terjebak dalam politik lokal yang belum stabil, dan lebih cenderung berorientasi pada kepentingan pasar.

Serambi Indonesia berhasil menggiring opini masyarakat menuju saran Mahkamah Konstitusi, dimana calon independen berhak untuk mengikuti Pemilukada, Serambi Indonesia mampu menghadirkan wacana yang menarik untuk dibaca masyarakat di tengah kungkungan atau penguasaan opini masyarakat dari partai berkuasa di tingkat lokal. Kekuatan untuk meyakinkan opini di tengah ketidakpercayaan publik terhadap calon independen itulah yang mampu dimenangkan oleh Serambi Indonesia.

Berbeda dengan Serambi Indonesia, Modus Aceh dalam pengkonstruksian terhadap keberadaan Partai Aceh dan calon independen walau tetap memberikan citra positif, namun

cenderung dalam setiap pemberitaan lebih ke penekanan mendalam. Mungkin dikarenakan Modus Aceh hadir dengan liputan investigasi dengan pola pemberitaan mendalam (indepth reporting), yang menjadi acuan dalam memberitakan realitas yang terjadi di Aceh dan menjangkau berbagai segmentasi pembaca yang beragam.

Pemberitaan Modus Aceh terhadap Partai Aceh lebih menekankan pada posisi bahwa Partai Aceh merupakan partai lokal mendominasi seluruh wilayah Aceh yang telah bertransformasi dari gerakan perlawanan menjadi gerakan politik. Dan masyarakat Aceh umumnya masih memiliki empati yang besar akan keberadaan Partai Aceh yang merupakan representasi perjuangan masyarakat Aceh. Sedangkan calon independen, modus Aceh cenderung mengkonstruksikan bagaimana proses perdebatan pro dan kontra terhadap diakomodasikannya calon independen ke dalam pilukada 2012 setelah disahkan oleh MK.

Sebagai media massa investigasi yang menekankan pemberitaan mendalam, Modus Aceh menilai kehadiran Calon independen tidak mungkin ditolak oleh PA, karena ini amanah konstitusi. PA dan DPRA hanya bisa menunda dengan alasan atau taktik politik tertentu. Meskipun kebijakan politik tersebut masih bisa dilangkahi oleh Peraturan Gubernur. Ketegangan politik yang menunda masuknya independen itulah yang menunda jadwal pilukada.

Dari serangkaian uraian pemberitaan tersebut terlihat jelas bagaimana Modus Aceh menegaskan dalam pemberitaannya terhadap PA yang menolak calon independen yang tidak sesuai dengan UUPA, bahkan dan mengancam untuk memboikot pilukada Aceh 2012. Tidak hanya menyoroti bagaimana penolakan dari PA, modus Aceh juga menunjukkan bahwa PA merupakan partai lokal yang merupakan hasil transformasi dari gerakan perlawanan menjadi gerakan politik, bahkan telah mendominasi hampir di seluruh wilayah Aceh. Disisi lain Modus Aceh melihat bahwa, ketegangan politik yang menunda masuknya calon independen merupakan hal yang menyebabkan pilukada Aceh tertunda dan menimbulkan polemik.

Dalam konteks ini Modus Aceh memanfaatkan serangkaian realitas dan mengkonstruksinya sebagai komoditas untuk kepentingan pasar. Hal lainnya juga memperlihatkan bagaimana secara tak langsung posisi Modus Aceh keberpihakannya pada PA yang merupakan representatif kepentingan lokal.

1.3 Analisa Hegemoni Gramsci

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka bisa digambarkan bahwa, motif ekonomi sangat berpengaruh bagi keberlangsungan ideologi suatu massa, dalam cakupan permasalahan media massa, faktor ekonomi bermain untuk mendelegasikan ide dan ideologi agar tetap bisa terlembaga, tanpa ada dorongan dan motif ekonomi mustahil pemberitaan wacana tertentu bisa berhasil. Dalam kasus pilukada Aceh dan polemik calon independen yang tengah panas tersebut. Adanya pengulangan pemberitaan tentang konflik tersebut, membuktikan bahwa ada pihak yang bermain dalam media yang mempunyai relasi dengan media tersebut, tujuannya adalah tentu saja bagi pihak yang berkorelasi dengan media tersebut untuk tetap menjaga permasalahan tersebut semakin runcing. Media yang digandeng oleh pihak tersebut, tentunya ikut bermain dimana oplah koran sebagai pertimbangannya, semakin naik oplah pemberitaan makan akan semakin untung koran tersebut, apalagi ditunjang pendanaan dengan pihak terkait yang punya kepentingan dengan isu tersebut. Isu yang digulirkan oleh media tersebut juga berkaitan

dengan masa depan Aceh, tentunya karena adanya keterikatan solidaritas tinggi di kalangan masyarakat Aceh maka, mereka bisa serta merta berada pada posisi yang sama sesuai dengan penggiringan isu oleh media lokal.

Ini sesuai dengan apa yang dirumuskan Gramsci dalam tiga tahap perkembangan dan perjalanan hegemoni untuk meluluskan sebuah ideologi, yaitu adanya korporat ekonomis yang bermain sebagai perantara media dengan isu, kemudian tahap kedua adalah adanya kelompok dalam masyarakat yang merasakan adanya kepentingan yang sama dengan apa yang diangkat oleh media massa terkait, di tahap yang ketiga adalah bagaimana semua yang diinginkan oleh korporat ekonomis tadi berhasil dengan cara propaganda nilai dari berita yang sudah diangkat dalam media massa lokal tersebut, sehingga masyarakat sebagai khalayak umum menerima nilai-nilai baru sebagai bentuk kebersamaan dan takut jika keluar dari nilai yang sudah dicetuskan lewat propaganda media massa lokal tadi. Ini yang dinamakan dengan tahapan hegemoni Gramsci di tengah publik Aceh menanggapi polemik pemilukada dan calon independen di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L. & Thomas Luckman. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books.
- Clark, M. (1977). *Antonio Gramsci and the Revolution that Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Ida, Rachmah dan Henry Subiakto. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana 2012
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisa Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2009.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2012.

Penulis

Firdaus Mirza Nusuari., S.TP, M.A. Lahir di kota syari'at Banda Aceh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menyelesaikan studi di program pascasarjana ISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Sosiologi konsentrasi pembangunan dan demokrasi pada tahun 2011. Saat ini menjadi dosen di Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat dan dosen ilmu sosial dasar di Universitas Islam Negeri Ar Ranirry Banda Aceh. Penulis dapat dihubungi via surel daus1016@gmail.com, twittwr: @fmirza1016.

Fadhillah Sri Meutia., S.sos, M.A. Lahir di kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Hasanuddin dan Pascasarjana Sosiologi di Universitas Gadjah Mada. Penulis tercatat sebagai dosen LB Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Alauddin Makassar. Semasa kuliah penulis tertarik mengkaji sosiologi dengan perspektif media. Penulis kini tengah menempuh pendidikan pada program Doktorat Sosiologi di Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi via surel dhilameutia@yahoo.com.